

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan suatu bagian integral dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan yang dilaksanakan secara terencana. Manfaat dalam pembangunan ekonomi dapat diperoleh melalui peran penting kebijakan pembangunan pertanian (Mosher, 1966; Nolic et al., 2014; Patra, 2014). Sektor pertanian dalam pembangunan nasional dipandang sebagai sektor yang menghasilkan manfaat bagi petani sampai dengan konsumen akhir, terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan produk pertanian. Hal ini sesuai dengan penerapan konsep manajemen rantai pasok yang bertujuan memenuhi permintaan konsumen, dari permintaan sebagai bahan baku untuk agroindustri maupun permintaan produk segar yang langsung dikonsumsi. Tujuan akhirnya diharapkan para pelaku rantai pasok dapat memperoleh manfaat yang dinikmati mulai dari hulu (petani) sampai ke hilir (konsumen akhir).

Rantai pasok adalah urutan dari proses pengambilan keputusan mengenai aliran material, aliran informasi dan aliran uang yang dilakukan secara bersama untuk memenuhi suatu produk ke tangan konsumen akhir secara kontinu. Manajemen rantai pasok dipandang sebagai metode, alat, atau pendekatan pengelolaan, keterpaduan perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian semua proses, dan kegiatan bisnis. Tujuannya adalah untuk memproduksi dan mengirimkan produk secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan mengintegrasikan secara efisien para pemasok, pabrikasi, pergudangan, dan penyimpanan. Harapan akhir dari proses tersebut adalah barang-barang diproduksi dan didistribusikan dengan jumlah yang benar, lokasi yang benar, dan saat yang tepat dalam rangka minimisasi biaya, sistem secara keseluruhan, sekaligus memenuhi seluruh kebutuhan disetiap tingkatan (Vorst et al, 2007; Pujawan, 2005; Simchi-Levi, David, et. al., 2003).

Faktor yang mempengaruhi manajemen rantai pasok terdiri dari struktur pelaku rantai pasok yang kompleks, dan ketidakpastian atau resiko yang terjadi dalam rantai pasok (Pujawan, 2005). Struktur rantai pasok menggambarkan peran pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok, arus informasi, material (bahan baku

dan produk), dan uang dalam rantai pasokan. Sebuah rantai pasok terdiri dari semua pihak, baik yang terlibat langsung (anggota primer), maupun yang terlibat tidak langsung (anggota sekunder). Banyaknya pelaku yang terlibat dalam sebuah rantai pasok memiliki kepentingan yang berbeda serta berkemungkinan saling bertentangan, maka kompleksitas rantai pasok mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu manajemen rantai pasok (Manuj, et.al., 2009; James, 2012). Adapun ketidakpastian pada rantai pasok meliputi ketidakpastian permintaan, pemasok dan internal. Ketidakpastian permintaan seperti resiko pasar, ketidakpastian dari pemasok seperti *lead time*, harga bahan baku, kualitas, dan kuantitas barang yang dikirim, sedangkan ketidakpastian internal seperti kerusakan mesin, konflik tenaga kerja, resiko operasional, resiko manajemen (Muchfiroddin et al., 2015; Guritno et al., 2015; Rohmah et al., 2015; Listyati et al., 2014; Suryaningrat et al., 2015; Drzymalski, 2012).

Dari hasil kajian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tema masalah penelitian dalam manajemen rantai pasok. Misalnya, yang terkait dengan komoditas agroindustri (Vorst et. al., 2000; Van Der Zee & Van Der Vorst, 2005; Wouda et. al., 2002). Selain itu, juga ada persoalan dengan model sistem transportasi yang mempengaruhi rantai pasok (Milan et.al., 2006; Grunow et al., 2007; Gigler, 2002). Begitu juga dengan sistem penunjang keputusan yang berdampak pada implementasi rantai pasok (Philpot et.al., 2001; Burer et al., 2007; Djohar et.al., 2003). Sementara, Ruben et al., (2006), Yandra et al., (2007), Widodo et al., (2006) melihat masalah rantai pasok ini dari aspek biaya yang lebih memfokuskan optimalisasi biaya dalam proses rantai pasok. Berdasarkan tema di atas terlihat bahwa umumnya penelitian pada bidang manajemen rantai pasok tersebut lebih didominasi oleh kinerja rantai pasok pada komoditas agroindustri menjadi lebih efisien dengan mengelola sistem para pelaku dan resiko serta biaya yang terjadi dalam rantai pasok, dan sedikit yang membahas kebijakan rantai pasok agroindustri dalam sektor ketersediaan bahan baku di subsistem hulu.

Pada dasarnya sektor pertanian khususnya sistem rantai pasok agroindustri terdiri dari petani, pabrik, distributor, retail, dan stakeholder lainnya yang akan dipengaruhi oleh faktor dimensi ekonomi, lingkungan, teknologi, sosial, dan legal. Dimensi ekonomi berhubungan dengan efisiensi rantai dalam perspektif manfaat

biaya dan orientasi pelanggan. Dimensi lingkungan berhubungan dengan cara produksi yang ramah lingkungan. Dimensi teknologi berhubungan dengan penerapan teknologi, sistem logistik, teknologi informasi, dan komunikasi untuk memperbaiki kinerja rantai pasok. Dimensi sosial dan legal berhubungan dengan norma-norma yang harus diikuti agar tidak merugikan banyak pihak (Vorst, 2004; Ruben et al., 2006). Berdasarkan konsep tersebut, maka seharusnya pemerintah dapat mempengaruhi sistem rantai pasok agroindustri pada dimensi legal yaitu melalui sebuah kebijakan tentang manajemen rantai pasok. Kebijakan tentang manajemen rantai pasok dapat berupa kebijakan subsidi suatu komoditas, kebijakan bahan baku, kebijakan kualitas produk, kebijakan terkait ekspor impor, kebijakan industri hilir, kebijakan tarif bea keluar dan lainnya. Jenis kebijakan dari dimensi legal tersebut diharapkan akan mengatur proses manajemen rantai pasok yang tujuannya menyampaikan manfaat ke pelaku rantai pasok. Dengan demikian kebijakan pemerintah dapat mengatasi kompleksitas struktur pelaku rantai pasok dan adanya ketidakpastian dalam sistem rantai pasok tersebut.

Terdapat tiga aliran dalam manajemen rantai pasok yaitu : aliran material, aliran informasi dan aliran uang. Pertama yaitu aliran material meliputi produk fisik bahan baku, pasokan yang mengalir di keseluruhan rantai pasok. Aliran material juga termasuk arus terbalik (*reverse logistic*). Kedua aliran informasi terdiri dari data yang terkait dengan permintaan, pengiriman, pesanan, pengembalian, dan jadwal, serta perubahan dalam salah satu data. Ketiga aliran uang melibatkan transfer uang, pembayaran atas produk terkait dan lainnya. Pada aliran uang tersebut diperoleh dari pembelian suatu produk yang dimanifestasikan dengan harga produk tersebut. Kotler (2008) menyebutkan harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. Harga menurut Doyle dan Saunders (1995) adalah variabel penting yang digunakan oleh konsumen karena berbagai alasan, seperti alasan ekonomis yang akan menunjukkan bahwa harga yang rendah atau harga yang selalu berkompetisi merupakan salah satu variabel penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Berdasarkan alasan psikologis, harga sering dianggap sebagai indikator kualitas. Oleh karena itu penetapan harga sering dirancang sebagai instrumen penjualan sekaligus sebagai instrumen kompetisi yang menentukan.

Selama ini pemerintah hanya menetapkan harga dasar dari berbagai komoditi bahan kebutuhan pokok. Dari segi peran pemerintah, harga jarang menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut berdampak pada monopoli dan ketidakstabilan pasar. Selama ini pemerintah menerapkan sistem campur tangan di pasar melalui kebijakan *antitrust*. Kebijakan pemerintah tersebut bertujuan mendorong kompetisi yang menciptakan efisiensi dalam perekonomian. Peran pemerintah memungkinkan kurva penawaran dan permintaan dalam berperan seimbang di pasar bebas. Hal ini dilakukan dengan menerapkan hukum yang disebut Undang-Undang *antitrust* yang bertujuan untuk mengekang kekuatan monopoli. Sedangkan untuk harga komoditas agroindustri khususnya yang mempunyai nilai ekspor kebijakan pemerintah hanya pada penetapan bea masuk dan keluar.

Secara umum penelitian tentang harga dalam rantai pasok dapat dikelompokkan menjadi beberapa topik, diantaranya analisis pengaruh perubahan harga atau transmisi harga (Rahmi, E dan B. Arif, 2012; Kustiari dan Nuryati, 2008; Rahayu, 2008; Tety, et.al, 2015), efisiensi dan elastisitas harga suatu komoditi pertanian (Tan, 2005), serta interpretasi dari struktur pasar yang terbentuk akibat suatu harga produk (Irawan, 2007). Kinerja rantai pasok agroindustri selama ini dipengaruhi dari ketidakpastian rantai pasok di sektor hulu yaitu ketidakpastian harga bahan baku. (Muchfirodin et al., 2015; Guritno et al., 2015; Rohmah et al., 2015; Listiyati et al., 2014; Suryaningrat et al., 2015; Drzymalski, 2012). Pada suatu sistem rantai pasok, harga bahan baku menjadi penentu ketersediaan bahan baku pada agroindustri. Semakin tinggi harga bahan baku agroindustri maka para petani semakin terangsang untuk menghasilkan bahan baku tersebut. Menjaga stabilitas ketersediaan produk penting dilakukan untuk menjaga kestabilan harga (Hariyanto, 2008; Riskayanto, 2013; Tan, 2005; Irawan, 2007). Maka dapat dilihat pentingnya pengendalian harga terhadap jaminan terhadap rantai pasok agroindustri.

Kakao termasuk dalam tanaman perkebunan dimana pada rantai pasok kakao terlibat banyak pelaku yang berperan. Pelaku pada manajemen rantai pasok kakao meliputi petani kakao, pedagang pengumpul, pedagang besar, agroindustri kakao dan eksportir kakao. Petani menjadi pelaku utama dalam rantai pasok agroindustri kakao karena hasil dari produksi petani menjadi bahan baku dalam agroindustri kakao. Ketersediaan kakao dari petani dapat menjadikan dukungan

bagi agroindustri kakao agar dapat berkelanjutan. Adanya ketidakpastian harga kakao pada petani dapat mengakibatkan ketersediaan kakao menjadi terganggu dan akan mempengaruhi keberlangsungan agroindustri kakao.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pada rantai pasok agroindustri kakao nantinya akan membentuk kebijakan harga kakao pada agroindustri kakao di Sumatera Barat. Berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga kakao. Sistem permodalan yang ada pada petani dapat mempengaruhi ketersediaan produk dan kualitas produk kakao dan akhirnya mempengaruhi harga kakao. Ali (2011) menyebutkan bahwa perlunya lembaga keuangan mikro pada sentra produksi kakao agar petani dapat mengakses permodalan untuk biaya produksi sehingga tercipta ketersediaan produk kakao. Kemudahan mengakses permodalan juga berhubungan dengan meningkatkan daya saing kakao salah satunya dengan mempertahankan harga (Harya, G.I, 2018). Pentingnya sistem permodalan melalui koperasi desa juga bertujuan agar petani tidak lagi meminjam modal kepada pedagang pengumpul dan terikat kontrak dengan pedagang pengumpul sehingga petani dapat menjual hasil produksi kakao dengan harga yang lebih tinggi (Irma, Hadayani and Kalaba, 2019).

Penelitian Ali et.al.,(2011) menyebutkan bahwa perlunya peran pemerintah melalui kontrol saluran distribusi kakao agar efisiensi pemasaran dapat tercapai termasuk dalam penetapan harga kakao. Selain itu peran pemerintah dalam deregulasi kebijakan dan mengembangkan infrastruktur juga dapat mempengaruhi harga kakao (Harya G.I, 2018). Peran pemerintah dalam pemberian subsidi pupuk atau jenis pestisida agar memenuhi standar fermentasi diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam harga kakao. Pelaku rantai pasok dalam hal penguasaan teknologi, dan keahlian juga sangat mempengaruhi kualitas kakao yang dihasilkan serta akhirnya mempengaruhi harga kakao di pasaran. Pada penelitian Yani dkk (2017) disebutkan bahwa petani harus memperhatikan penggunaan teknologi dan penanggulangan terhadap serangan hama penyakit tanaman kakao agar dapat meningkatkan produksi kakao sehingga mempengaruhi harga kakao. Hal yang sama dikemukakan dalam penelitian Rinaldi dkk (2013) bahwa keahlian petani sebagai salah satu pelaku sektor hulu dalam agroindustri

kakao dalam hal melakukan fermentasi menjadi faktor yang mempengaruhi harga kakao sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Perihal lain bahwa ketidakpastian harga kakao dipengaruhi oleh tingkat produksi kakao dalam hal ini ketersediaan kakao. Pada penelitian tersebut diperlihatkan adanya hubungan kebijakan ekspor kakao yang mempengaruhi ketidakpastian harga kakao dikarenakan akan mempengaruhi ketersediaan kakao yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi harga adalah kualitas kakao. Perlu upaya untuk meningkatkan kualitas biji kakao Indonesia sehingga biji kakao Indonesia mempunyai posisi tawar yang tinggi. Peningkatan kualitas kakao sebagai penentu harga mempunyai pengaruh dalam efisiensi pemasaran kakao juga disebutkan dalam penelitian Ali et al., (2011). Hal yang sama pada penelitian Harya, G.I (2018) menyebutkan bahwa pada dasarnya peningkatan harga menggambarkan mutu dan kualitas kakao. Adapun penelitian Irma et al., (2019) menyebutkan sistem pemasaran juga mempengaruhi harga dikarenakan semakin pendek saluran pemasaran dapat menguntungkan dan memberikan kontribusi harga lebih. Melalui sistem pemasaran maka petani bisa memanfaatkan informasi tentang harga dan permintaan sehingga bisa memproduksi sesuai tingkat harga yang diharapkan.

Secara umum penelitian terdahulu tentang kebijakan harga pada rantai pasok agroindustri, lebih dipandang dari segi konsumen bukan dari sudut pandang kesejahteraan petani. Padahal dalam suatu sistem rantai pasok terdapat entitas rantai pasok dari hulu yaitu petani sampai ke hilir yaitu konsumen akhir. Berdasarkan hal tersebut maka dirasakan penting untuk membuat penelitian tentang kebijakan harga dalam penyediaan bahan baku agroindustri yang nantinya akan menjadi faktor penentu keberhasilan keberlanjutan agroindustri.

1.2. Perumusan Masalah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu lokasi pengembangan industri pengolahan komoditi unggulan daerah. Industri pengolahan kakao menjadi salah satu komoditi unggulan yang ada di Sumatera Barat. Produksi kakao Indonesia sekitar 53.816 ton atau 8.05 persen berasal dari Sumatera Barat (Outlook Kakao, 2022). Pada agroindustri kakao yang ada selama ini, kebijakan

pemerintah mengarah kepada produksi kakao, meliputi pemberlakuan SNI bagi produksi kakao bubuk, serta penunjukkan lembaga penilaian kesesuaian untuk pemberlakuan dan pengawasan SNI kakao. Sedangkan kebijakan perdagangan lebih mengarah pada ekspor kakao seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. Kebijakan harga patokan ekspor produk kakao tersebut dikarenakan adanya diskriminasi Cina terhadap kakao asal Indonesia yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%, sedangkan impor kakao dari Malaysia tidak dikenakan bea masuk atau 0% (Ragimun, 2012; Shandri & Afrizal, 2017).

Bentuk kebijakan atas komoditi kakao bermula pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2009. Pada peraturan tersebut pemerintah mengatur kebijakan pemberlakuan SNI No 3747:2009 tentang kakao bubuk secara wajib. Kebijakan lainnya pada Peraturan Menteri Perindustrian No 143 tahun 2009 mengenai penunjukkan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penerapan/pemberlakuan dan pengawasan SNI kakao bubuk secara wajib. Kebijakan komoditas kakao ini juga diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2010, yaitu mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, dimana harga referensi biji kakao yang berpedoman pada harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata CIF New York Board of Trade (NYBOT), New York.

Kebijakan komoditas kakao lainnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2014 mengenai persyaratan mutu dan pemasaran biji kakao. Secara umum pada kebijakan tersebut diatur bahwa biji kakao yang beredar di Indonesia adalah biji kakao yang telah terfermentasi dan memenuhi persyaratan mutu lainnya yang telah ditetapkan. Permasalahan pada agroindustri kakao, khususnya di Sumatera Barat meliputi kurang efisiennya pemasaran kakao dengan indikator besarnya margin pemasaran dan kecilnya bagian harga yang diterima petani, produktivitas dan mutu kakao yang masih rendah karena belum diadopsinya inovasi teknologi budidaya dan pasca panen kakao oleh petani. Rendahnya adopsi teknologi pedagang kakao dikarenakan pendidikan dan pengalaman masih kurang.

Rendahnya minat petani untuk mengolah produk turunan kakao juga menjadi permasalahan di agroindustri kakao. Petani hanya melakukan aktivitas penjemuran terhadap biji kakao dan hanya sebagian kecil sudah melakukan fermentasi terhadap biji kakao. Padahal produk sekunder biji kakao dapat meningkatkan pendapatan pedagang kakao (Danil, 2014; Hasan 2017).

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa agroindustri, diantaranya UPTD Sawahlunto yang mengolah biji kakao menjadi cokelat batang dan cokelat bubuk. Biji kakao tersebut berasal dari beberapa kelompok tani yang menjual ke UPTD Sawahlunto dalam keadaan belum difermentasi. Harga biji kakao pada UPTD tersebut ditentukan oleh UPTD Sawahlunto dengan kisaran harga Rp 30.000/ kg – Rp 37.000/ kg. “Rumah Cokelat” salah satu agroindustri kakao di Kota Sawahlunto mendatangkan bahan bakunya yaitu pasta cokelat dari Payakumbuh dengan harga Rp 45.000 / kg. Keadaan hampir sama pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Koto Hilalang Sapakat, Nagari Sikucur, Kabupaten Pariaman. Pada awal berdirinya merek “Adam Cokelat” di Kabupaten Pariaman tersebut, mempunyai dua tempat agroindustri kakao yang berada pada Nagari Sikucur dan Sintoga. Namun pada awal tahun 2018 tempat pengolahan kakao yang berada di Nagari Sikucur tersebut berhenti dikarenakan adanya peminjaman mesin pemisah lemak yang dipindahkan ke tempat pengolahan kakao yang berada di Sintoga. Hal itu disebabkan adanya orientasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pariaman yang menetapkan SNI bagi bubuk cokelat yang dihasilkan harus tercapai pada tahun 2018.

Sementara di daerah Payakumbuh terdapat agroindustri kakao, yaitu “Chokato”. Petani mitra menjual biji kakao ke Chokato dalam keadaan sudah terfermentasi yaitu dengan kisaran harga Rp 35.000/ kg. Sedangkan biji kakao dari petani selain petani mitra yang dijual ke Chokato secara umum masih belum terfermentasi yaitu dengan kisaran harga Rp 30.000/ kg. Kondisi lainnya ada di Nagari Salayo Kabupaten Solok. Salah satu kelompok tani di Nagari Salayo tersebut yaitu Kelompok Tani Saiyo telah menjadi Pusat Unit Fermentasi Pemasaran Biji Kakao (UFPBK). Akan tetapi walaupun pada Nagari Salayo tersebut sudah terdapat UFPBK tapi tidak semua petani melakukan fermentasi pada biji kakao yang mereka panen.

Hal ini disebabkan tidak adanya perbedaan harga yang signifikan antara harga biji kakao yang terfermentasi dan yang tidak terfermentasi. Selain itu penyebab lainnya dikarenakan waktu tambahan akibat proses fermentasi tersebut. Faktor lain terkait sarana prasarana yang petani perlukan untuk melakukan proses fermentasi. Adanya tambahan waktu dan tambahan modal untuk membeli sarana prasarana guna melakukan fermentasi tersebut dianggap petani tidak sebanding dengan perbedaan harga kakao yang fermentasi dengan yang tidak fermentasi.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2014 mengenai persyaratan mutu dan pemasaran biji kakao bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah biji kakao Indonesia, dan meningkatkan pendapatan pedagang kakao. Peningkatan pendapatan pedagang kakao merupakan dampak dari peningkatan daya saing dan nilai tambah biji kakao Indonesia dan pengembangan agroindustri kakao dalam negeri. Tetapi keadaan yang diharapkan tidak akan terwujud tanpa adanya kebijakan penetapan harga bahan bakunya, terkait dengan minat masyarakat untuk membudidayakan kakao.

Simchi-Levi (2003) mendefinisikan manajemen rantai pasok sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien para pemasok, pabrikasi, pergudangan dan penyimpanan sehingga barang-barang diproduksi dan didistribusikan dengan jumlah yang benar, dilokasi yang benar, dan saat yang tepat, dalam rangka meminimisasi biaya sistem secara keseluruhan sekaligus memenuhi pelayanan seluruh kebutuhan disetiap tingkatan. Sesuai dengan tujuan dari manajemen rantai pasok yaitu untuk memproduksi dan mengirimkan produk secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan mengintegrasikan secara efisien para pemasok, pabrikasi, pergudangan, dan penyimpanan. Sesuai harapan akhir dari proses manajemen rantai pasok adalah barang-barang diproduksi dan didistribusikan dengan jumlah yang benar, lokasi yang benar, dan saat yang tepat dalam rangka meminimisasi biaya, sistem secara keseluruhan, sekaligus memenuhi seluruh kebutuhan disetiap tingkatan (Vorst et al, 2007; Pujawan, 2005; Simchi-Levi et al., 2003). Berdasarkan kondisi di atas dapat ditetapkan asumsi penelitian dalam penelitian ini yakni penetapan harga kakao selama ini tidak diperlakukan sebagai kompensasi kualitas kakao dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga kakao pada rantai pasok agroindustri kakao selama ini belum membentuk kebijakan

penetapan harga kakao. Hal ini bertentangan dengan konsep manajemen rantai pasok yang seharusnya yang mana bertujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan disetiap tingkatan termasuk tingkat petani. Dengan demikian seharusnya ada sebuah kebijakan harga di tingkat petani yang dibuat berdasarkan sistem penetapan harga yang ada dikondisi saat ini dengan faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, merupakan alasan mengapa perlu mengkaji mengenai kebijakan harga komoditi kakao di Sumatera Barat. Dimana kebijakan harga adalah faktor penting dalam peningkatan mutu kakao. Pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan harga sebagai perangsang penyediaan bahan baku agroindustri kakao sehingga nantinya agroindustri kakao di Sumatera Barat khususnya dapat berkelanjutan. Rumusan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penetapan harga kakao di tingkat petani untuk mendukung rantai pasok agroindustri kakao Sumatera Barat?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penetapan harga di tingkat petani untuk mendukung rantai pasok agroindustri kakao Sumatera Barat?
3. Bagaimana kebijakan harga di tingkat petani dapat menjadi stimulus bagi penyediaan bahan baku agroindustri kakao Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem penetapan harga kakao di tingkat petani untuk mendukung rantai pasok agroindustri kakao Sumatera Barat
2. Menganalisis faktor apa yang mempengaruhi penetapan harga di tingkat petani untuk mendukung rantai pasok agroindustri kakao Sumatera Barat
3. Merumuskan kebijakan harga di tingkat petani dapat menjadi stimulus bagi penyediaan bahan baku agroindustri kakao Sumatera Barat

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Salah satu peraturan terkait kakao diantaranya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/OT.140/5/ 2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. Tujuan Permentan tersebut adalah meningkatkan

daya saing dan nilai tambah biji kakao Indonesia, mendukung pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri, memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran biji kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu, meningkatkan pendapatan petani kakao dan mempermudah penelusuran kembali kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran. Permentan tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah pada komoditas kakao yang akhirnya dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan indikasi bahwa pada sektor hulu dalam agroindustri kakao belum terdapat keberpihakan kepada petani kakao. Terutama dalam hal penetapan harga kakao pada petani. Hal tersebut menjadikan menurunnya minat para petani untuk berbudidaya kakao, yang akhirnya menurunkan ketersediaan bahan baku pada agroindustri kakao. Lingkup penelitian ini adalah analisis kebijakan harga kakao di tingkat petani untuk mendukung rantai pasok agroindustri kakao Sumatera Barat yang nantinya dapat dijadikan stimulus dalam penyediaan bahan baku agroindustri kakao Sumatera Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak pelaku sistem rantai pasok agroindustri kakao dalam hal ini petani, pedagang perantara dan pedagang pengumpul, hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan keuntungan sehingga dapat meningkatkan minat para pelaku untuk kembali menanam dan mengolah kakao.
2. Bagi Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dalam membuat kebijakan harga pada penyediaan bahan baku agroindustri kakao di Sumatera Barat.

1.6. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Output yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kebijakan harga pada sektor hulu agroindustri kakao Sumatera Barat, dimana kebijakan yang dihasilkan dapat menjadikan stimulus bagi penyediaan bahan baku agroindustri kakao yang ada agar agroindustri kakao di Sumatera Barat dapat berkelanjutan. Keberadaan Permentan Nomor 67 Tahun 2014 akan menjadi pengembangan kebijakan dan

mendukung rantai pasok agroindustri kakao. Sesuai dengan ruang lingkup Permentan tersebut meliputi kelembagaan, persyaratan mutu dan penanganan, pemasaran, pembinaan dan pengawasan. Harapannya jika hal tersebut dijadikan basis penguatan petani dari segi produksi kakao maka aliran dalam rantai pasok harus dikelola dengan baik

Kebaruan penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan harga melalui pembentukan kelembagaan berupa koperasi dan pengawasan serta sanksi dari kebijakan yang sudah ada serta adanya sistem informasi bagi petani berupa keterbukaan data permintaan, daerah pemasaran serta harga jual kakao. Kebaruan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kombinasi metode kuantitatif (*Struktural Equation Modelling*) dengan metode kebijakan Weimer dan Vinning. Pengumpulan informasi yang diperoleh dari metode SEM memberikan kontribusi baik kepada analisis permasalahan maupun analisis solusi pada model kebijakan yang dibentuk.

